



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA PUSAT  
10710; TELEPON (021) 3865130, 3814411; FAKSIMILE (021) 3846402; LAMAN WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-537/PB/2020 23 Juni 2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 berkas  
Hal : Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal tingkat UAKPA dan KPPN Tahun 2020

Yth. Sekretaris Jenderal /Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala/  
Direktur Keuangan/Deputi Kementerian Negara/Lembaga/Jaksa Agung  
Muda Bidang Pembinaan sesuai daftar terlampir

Sehubungan dengan pelaksanaan rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2020, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rekonsiliasi eksternal antara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)/Satuan Kerja (Satker) dengan KPPN dan penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W, UAPPA-E1, maupun UAPA Tahun 2020 menggunakan Aplikasi e-Rekon&LK yang diakses melalui alamat *website* [www.e-rekon-lk.djpbn.kemenkeu.go.id](http://www.e-rekon-lk.djpbn.kemenkeu.go.id).
2. Aplikasi yang digunakan dalam pelaksanaan rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan, baik untuk satker maupun BLU (satker dan BLU yang belum mengimplementasikan semua modul SAKTI secara penuh) adalah:
  - a. Aplikasi SAIBA versi 20.0.0 referensi versi 20.0.0;
  - b. Aplikasi SIMAK BMN versi 20.0.0 referensi versi 20.0.0; dan
  - c. Aplikasi Persediaan versi 20.0.0 referensi versi 20.0.0.
3. Pelaksanaan rekonsiliasi eksternal Tahun 2020 mulai dilaksanakan untuk periode rekonsiliasi Bulan Mei 2020. Arsip Data Komputer (ADK) rekonsiliasi Bulan Mei 2020 merupakan **data kumulatif transaksi keuangan** dari Januari s.d. Mei 2020. Adapun ketentuan rekonsiliasi Bulan Mei 2020 sebagai berikut :

- a. Jadwal pelaksanaan rekonsiliasi

Periode Rekonsiliasi	<i>Open Period</i>	Periode Penyelesaian Rekonsiliasi	<i>Closed period</i>
(1)	(2)	(3)	(6)
Mei 2020	23 s.d. 30 Juni 2020	23 s.d. 30 Juni 2020	1 Juli 2020

- b. Apabila data telah sesuai dengan kebijakan penerbitan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga, KPPN melakukan "*approval*" dan selanjutnya kedua belah pihak (UAKPA dan KPPN) melakukan proses tanda tangan secara elektronik;

- c. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam BAR sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 104/PMK.05/2017;
  - d. Khusus pelaksanaan rekonsiliasi eksternal Bulan Mei 2020, dikecualikan dari aturan sanksi sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 104/PMK.05/2017.
4. Sebelum melakukan rekonsiliasi eksternal, Kementerian Negara/Lembaga agar memastikan bahwa rekonsiliasi internal telah dilakukan antara UAKPA dan UAKPB.
  5. Ketentuan dan jadwal rekonsiliasi eksternal Semester I Tahun 2020 diatur lebih lanjut.
  6. Selain melaksanakan rekonsiliasi eksternal antara UAKPA/satker dengan KPPN, satker juga melaksanakan pengisian data capaian output untuk dilakukan proses konfirmasi oleh KPPN dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Pengisian data capaian output dilakukan oleh satker dengan menggunakan Aplikasi SAS versi terbaru atau Aplikasi SAKTI untuk satker yang menerapkan SAKTI secara penuh.
    - b. Penyampaian data capaian output sampai dengan Bulan Mei 2020 mengikuti ketentuan *open period* sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a. Selanjutnya, penyampaian data capaian output dilakukan sepanjang *open period* pertama pada saat pelaksanaan rekonsiliasi LK.
  7. Kementerian Negara/Lembaga agar menyampaikan maksud surat ini kepada seluruh UAPPA/B-E1, UAPPA/B-W, dan UAKPA/B.
  8. Pertanyaan atau permintaan informasi melalui Layanan *Helpdesk* HAI-DJPBN pada *website* [hai.kemenkeu.go.id](http://hai.kemenkeu.go.id) dapat disampaikan dalam hal terdapat permasalahan penggunaan aplikasi e-Rekon&LK.

Demikian disampaikan untuk dipedomani. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Perbendaharaan  
Direktur Akuntansi dan Pelaporan  
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik  
R. Wiwin Istanti

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
3. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
4. Direktur Pelaksanaan Anggaran



## LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- /PB/2020

Tanggal : Juni 2020

**DAFTAR SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS UTAMA/SEKRETARIS/  
KEPALA/WAKIL KEPALA/DIREKTUR KEUANGAN/DEPUTI  
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN**

No.	Kementerian Negara/Lembaga
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
2.	Dewan Perwakilan Rakyat RI
3.	Dewan Perwakilan Daerah RI
4.	Badan Pemeriksa Keuangan RI
5.	Mahkamah Agung RI
6.	Mahkamah Konstitusi RI
7.	Komisi Yudisial RI
8.	Kejaksaan Agung RI
9.	Kementerian Sekretariat Negara RI
10.	Kementerian Dalam Negeri RI
11.	Kementerian Luar Negeri RI
12.	Kementerian Pertahanan RI
13.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
14.	Kementerian Keuangan RI
15.	Kementerian Pertanian RI
16.	Kementerian Perindustrian RI
17.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
18.	Kementerian Perhubungan RI
19.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
20.	Kementerian Kesehatan RI
21.	Kementerian Agama RI
22.	Kementerian Ketenagakerjaan RI
23.	Kementerian Sosial RI
24.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
25.	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
26.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
27.	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI
28.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
29.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
30.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman



No.	Kementerian Negara/Lembaga
31.	Kementerian Pariwisata RI
32.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI
33.	Kementerian Riset, Teknologi, dan Badan Riset Inovasi Nasional RI
34.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
35.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
36.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
37.	Badan Intelijen Negara
38.	Badan Siber dan Sandi Negara
39.	Dewan Ketahanan Nasional
40.	Badan Pusat Statistik
41.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
42.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
43.	Perpustakaan Nasional
44.	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
45.	Kepolisian Negara RI
46.	Badan Pengawas Obat dan Makanan
47.	Lembaga Ketahanan Nasional
48.	Badan Koordinasi Penanaman Modal
49.	Badan Narkotika Nasional
50.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
51.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
52.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
53.	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
54.	Komisi Pemilihan Umum
55.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
56.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
57.	Badan Tenaga Nuklir Nasional
58.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
59.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
60.	Badan Informasi Geospasial
61.	Badan Standardisasi Nasional
62.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
63.	Lembaga Administrasi Negara
64.	Arsip Nasional RI
65.	Badan Kepegawaian Negara
66.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
67.	Kementerian Perdagangan RI

No.	Kementerian Negara/Lembaga
68.	Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
69.	Komisi Pemberantasan Korupsi
70.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
71.	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
72.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
73.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
74.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
75.	Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
76.	Ombudsman RI
77.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
78.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
79.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
80.	Sekretaris Kabinet
81.	Badan Pengawas Pemilu
82.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
83.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
84.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
85.	Badan Keamanan Laut
86.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila